



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 426.44/PAN.MK/7/2020
Hal : **Panggilan Sidang**

17 Juli 2020

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akan diselenggarakan pada:

hari : **Rabu**
tanggal : **22 Juli 2020**
waktu : **Pukul 10.00 WIB**
tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Pengucapan Ketetapan**

Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**, berkehendak untuk mengetahui dan/atau mendengarkan Sidang Pleno Pengucapan Putusan dimaksud dapat menghadiri dan/atau menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk hadir dalam persidangan tersebut.

Bahwa persidangan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi *corona virus disease* (Covid-19), sehingga Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 (dua) orang. Selain itu para pihak dapat menghadiri persidangan tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi melainkan cukup mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri persidangan melalui media online paling lambat 2 hari sebelum persidangan diselenggarakan. (*Daftar nama kehadiran para pihak wajib disampaikan melalui email panitera@mkri.id paling lambat H-2 sebelum persidangan*).

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.



NIP. 19610818 198302 1 001